**KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN PEMALANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMILU**

****

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

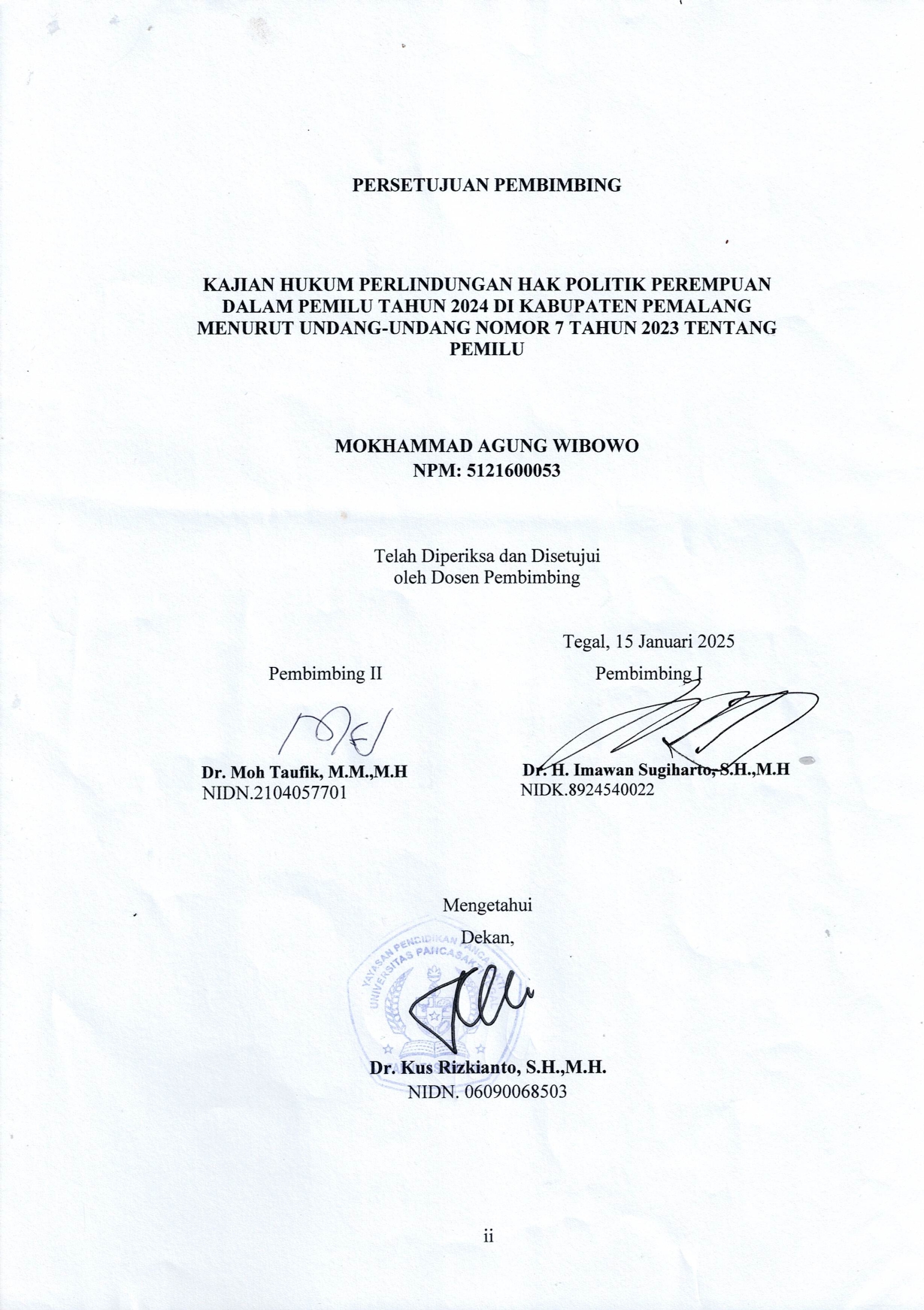
**MOKHAMMAD AGUNG WIBOWO**

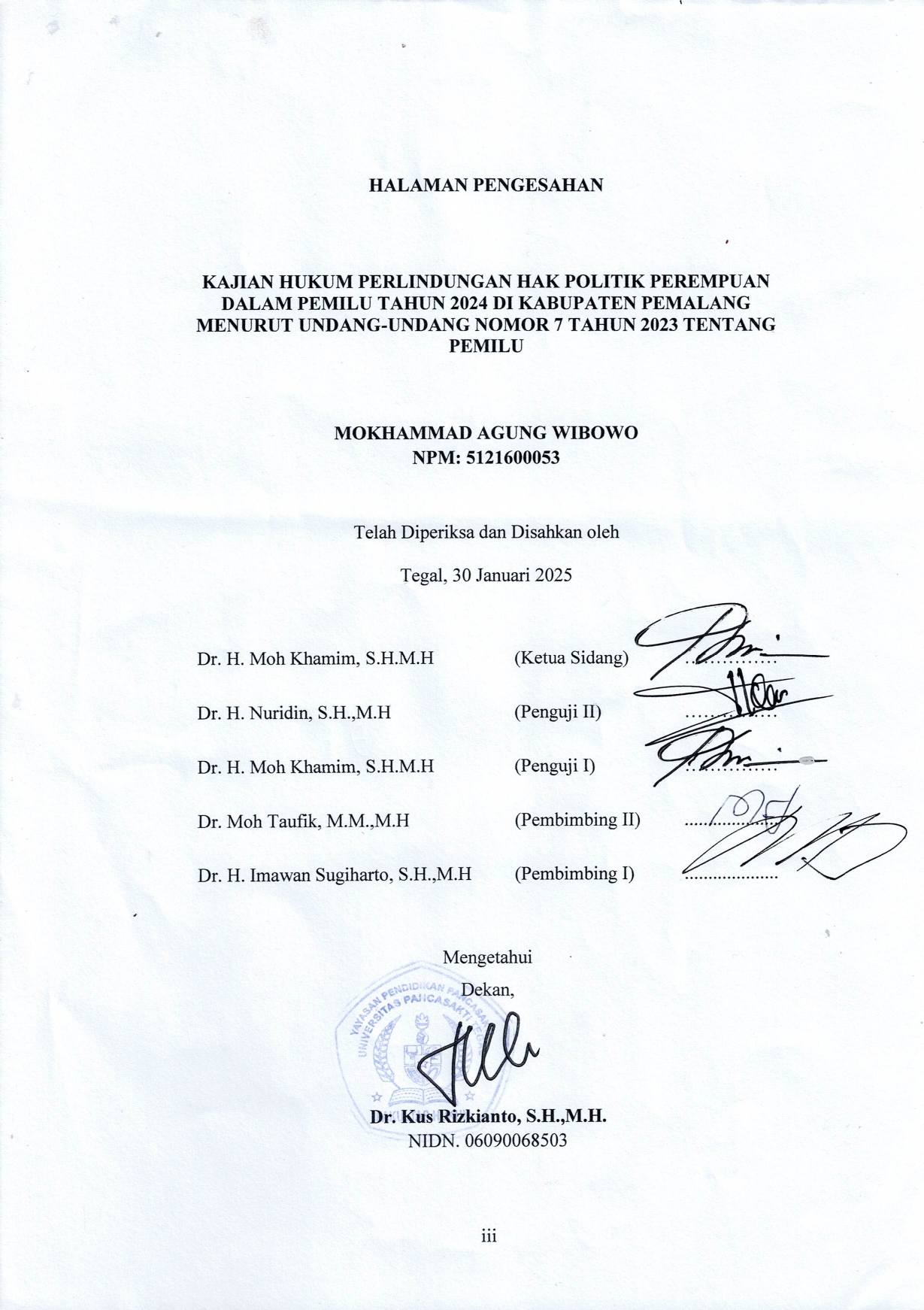
**NPM: 5121600053**

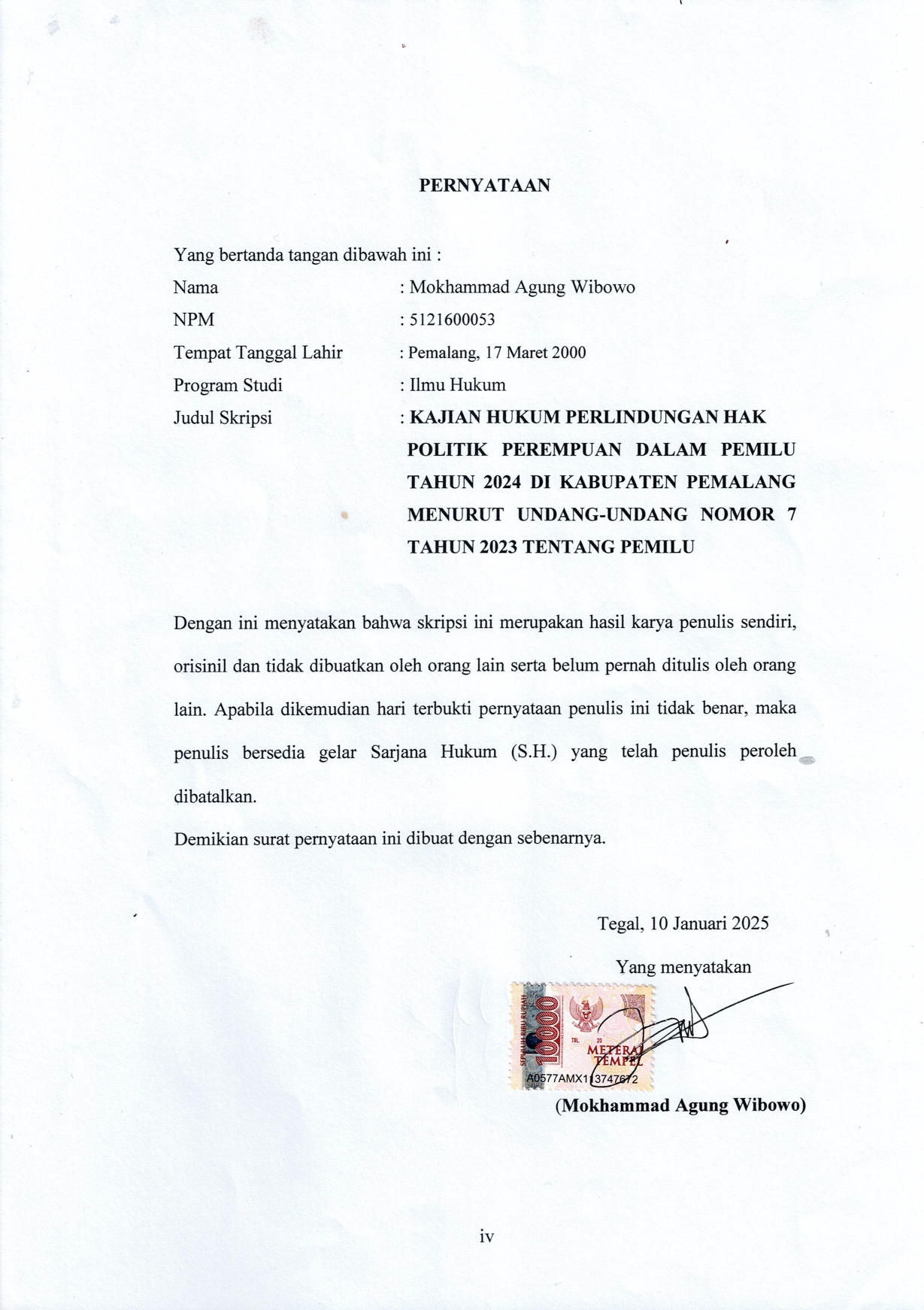
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**



****

****

**HALAMAN MOTTO**

“Lewati saja badainya, nikmati dulu prosesnya, tapi jangan rubah tujuannya.”

– Mokhammad Agung Wibowo

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

* Allah SWT yang sudah memberi kelancaran dalam setiap proses untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi ini dari awal sampai akhir;
* Orang tua, terima kasih untuk pengorbanan, dukungan, cinta kalian sehingga atas doa dan restu mereka saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
* Juga untuk semua teman dan sahabat yang telah membantu saya baik dalam materil maupun moriil. Semoga Allah SWT akan membalas kebaikan kalian.

**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, *alhamdulilah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skrispsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW, yang telah membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum, selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Dr. Kus Rizkianto, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Fajar Dian Aryani, S.H.,MH, selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Dr. H. Moh Khamim, S.H.M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Dr. H. Imawan Sugiharto, S.H.,M.H, selaku Pembimbing I, dalam skripsi ini yang telah banyak memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dr. Moh. Taufik, M.M.,M.H, selaku Pembimbing II, dalam skripsi ini yang telah banyak memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi strata I, mudah- mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT sebagai amal shalih.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orang tua, atasan, sanak saudara, rekan-rekan kantor penulis yang membantu baik dalam moriil maupun materiil pada penulis dalam menempuh studi,
11. Para sahabat penulis dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skrisi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu,

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 10 Januari 2025

# Penulis

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# Nama : Mokhammad Agung Wibowo

# NPM : 5121600053

# Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 17 Maret 2000

# Program Studi : Ilmu Hukum

# Alamat : Dusun 04 RT/RW 002/008 Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

Riwayat Pendidikan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Sekolah | Tahun Masuk | Tahun Lulus |
| 1. | SD Negeri 1 Banjardawa | 2006 | 2012 |
| 2. | SMP Negeri 2 Taman | 2012 | 2015 |
| 3. | SMK PGRI 1 Taman | 2015 | 2018 |
| 4. | S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal | 2021 | - |

# Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

# Tegal, 10 Januari 2025

# Hormat saya,

# (Mokhammad Agung Wibowo)

# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hak politik perempuan dalam pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pemilu dengan fokus utama pada partisipasi Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Pemalang serta Kendala Yang Menyebabkan Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Di Kabupaten Pemalang 2024 Rendah

Isu tentang representasi perempuan menjadi sangat penting karena banyak kebijakan yang dinilai tidak pro terhadap perempuan. Meskipun belum mencapai kuota tetapi tahun ini representasi perempuan mengalami kenaikan. Perlu adanya perhatian khusus terhadap masalah representasi perempuan di dalam politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan kedudukan politik Perempuan dalam Pemilihan Umum tahun 2024 serta tantangannya menuju kesetaraan gender. Ini penting untuk dianalisis secara mendalam sebagai representasi bahwa perempuan dan laki-laki setara, sehingga haknya sama dalam

proses pelaksanaan dalam Pemilihan Umum. Diperlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai tujuan ini. Kesimpulan ini menekankan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik, dibutuhkan upaya terpadu dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan media. Hanya dengan kerjasama yang kuat, dapat diharapkan terwujudnya lingkungan politik yang lebih inklusif dan setara bagi perempuan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kedudukan Politik Perempuan, Pemilu 2024,

**ABSTRACT**

This study aims to analyze how the protection of women's political rights in elections according to Law Number 7 of 2023 concerning Elections with a main focus on the participation of the Level of Women's Political Participation in the 2024 Election in Pemalang Regency and the Obstacles That Cause the Level of Women's Political Participation in Pemalang Regency to be Low in 2024

The issue of women's representation is very important because many policies are considered not pro-women. Although it has not reached the quota, this year women's representation has increased. There needs to be special attention to the problem of women's representation in politics. The method used in this study is normative legal research with a statutory regulatory approach. Data was collected from primary and secondary sources related to the political position of women in the 2024 General Election and its challenges towards gender equality. This is important to analyze in depth as a representation that women and men are equal, so that their rights are the same in the implementation process in the General Election. Continuous commitment from all levels of society is needed to achieve this goal. This conclusion emphasizes that to achieve gender equality in politics, integrated efforts are needed from various parties, including the Government, civil society, educational institutions, and the media. Only with strong cooperation can a more inclusive and equal political environment for women be expected.

Keywords: Legal Protection, Women's Political Position, 2024 Election,

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN iv

HALAMAN MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ix

ABSTRAK x

ABSTRACT xi

DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 8
3. Tujuan Penelitian 9
4. Kegunaan Penelitian 9
5. Tinjauan Pustaka 9
6. Metode Penelitian 13
7. Jenis Penelitian 13
8. Metode Pendekatan 14
9. Spesifikasi Penelitian 14
10. Sumber Data 14
11. Metode Pengumpulan Data 16
12. Metode Analisis Data 16
13. Sistematika Penulisan 16

BAB II LANDASAN KONSEPTUAL 18

1. Tinjauan Umum tentang Pemilu 18
2. Pengertian Pemilu 18
3. Sistem Pemilihan Umum 21
4. Tinjauan Umum tentang Gender 27
5. Gender dan Politik 27
6. Perempuan dan Politik 27
7. Tinjauan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam

Pemilu 28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 34

1. Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Pemalang 34
2. Kendala Yang Menyebabkan Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Di Kabupaten Pemalang 2024 Rendah 47
3. Kendala Sosial dan Budaya 50
4. Kendala Ekonomi 51
5. Kendala Pendidikan dan Akses Informasi 51
6. Kendala Psikologis dan Kultural 52
7. Kendala Akses dan Partisipasi dalam Struktur Politik Formal 53
8. Kendala Kesehatan dan Waktu 53
9. Kepercayaan Terhadap Institusi Politik 54

BAB IV PENUTUP 58

1. Kesimpulan 58
2. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 60

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

*Democratie* (*democracy*) salah satu paham kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ini dianut oleh Negara Indonesia. Hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*) ini sesuai dengan sistem konstitusional UUD yang menyelenggarakan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) menjadi dua kedaulatan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan kesamaan mata uang yang dimilikinya. Tidak terpisahkannya Negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democracy*), hal tersebut sesuai dngan UUD Negara Indonesia. MPR memiliki beberapa kekuasaan berupa DPR dan DPD; Presiden dan wakil presiden; Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Hal ini merupakan termasuk kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung.[[1]](#footnote-1)1

Berdasarkan ketentuan konstitusionalisme di atas, tampak diketahui bahwa karakteristik yang kuat dimiliki oleh Negara hukum dengan adanya kesamaan (*equality*) tidak adanya diskrimisani gender atau jenis kelamin dan hal dalam aspek sosial politik.

Dalam kenyataannya, pengimplementasian persamaan (*equality)* hak-hak politik tanpa adanya perbedaan gender masih jauh dari harapan. Dibuktikan dengan kurangnya pemberdayaan perempuan di dalam parlemen atau lembaga pemerintahan di Negara ini.

Negara Indonesia masih menganggap bahwa partisipasi perempuan masih dipandang rendah dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan laki-laki, tidak hanya ditingkat supra structural politik (eksekutif, legislative dan yudikatif) tetapi juga di infra structural politik. Hal tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan terkait dengan kualitas pihak perempuan atau terkait dengan akses maupun aturan hukum yang dibuat perempuan dalam posisi marginal.

Pemilihan kepala dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat, secara konstitusional telah memenuhi rumusan sistem pemerintahan yang dianut bangsa Indonesia dan Negara hukum menjadi landasan pada Negara Indonesia. Salah satu unsur Negara Hukum yaitu pengakuan terhadap hak asasi manusia. Sistem pemerintahan yang demokratis memiliki ciri berupa hak-hak asasi manusia dalam perspektif filosofis.

Demokrasi menjadi cara untuk mengorganisir rakyat dalam pemerintahan negara untuk turut memikirkan, mengawasi, melaksanakan dan mengendalikan para pelanggar hak azazi manusia dalam masyarakat. Rakyat membuat aturan, melaksanakan aturan itu serta mengawasi atau mengadili para pelanggar aturan itu.

Abdul Azis Wahabmenyatakan bahwa :

1. Demokrasi menjadi salah satu doktrin politik luhur memberikan dampak positif dan manfaat bagi berbagai Negara dan menjadi hal yang viral;
2. Demokrasi menjadikan terselenggaranya lingkungan politik yang stabil dan tahan banting serta menjadi sistem politik serta pemerintahan yang memiliki akar sejarah ke jaman Yunani;
3. Demokrasi menjadi sistem yang alamiah dan manusiawi, kesempatan yang diberikan untuk masyarakat maka masyarakat tersebut akan memilih sesuai dengan pilihannya[[2]](#footnote-2)2.

Implementasi persamaan hak dalam politik kenegaraan yang menerapkan prinsip demokratisasi inilah maka perlu adanya pengakuan dan perlindungan secara konstitusional hak pilih universal, tanpa diskriminasi atas dasar apapun juga. Artinya hak memilih atau dipilih itu dimiliki oleh setiap warga melalui instrumen pemilihan jujur dan adil bagi warga negara yang memenuhi syarat. Lembaga legislatif perlu mendistribusikan kebebasan untuk menciptakan ruang politik bagi pemaduan dan artikulasi kepentingan politik masyarakat. Serta adanya sistem pemilihan yang bisa menjamin kualitas Gubernur dan pasangannya, baik dari dimensi kualifikasi maupun kualitas artikulasi politiknya dalam mendesakkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, perlu adanya kultur politik partisipatif emansipatoris, sehingga keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan bukan karena didesak oleh arus mobilisasi, melainkan karena kesadaran politik otonom untuk turut menentukan wajah dan masa depan daerahnya, adanya kesempatan dan pengakuan politik bagi pengawasan partikelir terhadap segenap proses pelaksanaan pemilihan, maka jalannya pemilu secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil akan menjadi salah satu jalan dalam pemilu.[[3]](#footnote-3)3

Peran perempuan dianggap rendah baik dibidang politik atau yang lainnya, rendahnya pandangan terhadap pengetahuan perempuan di bidang politik dapat dilihat dari anggapan hanya sebagai pemanis atau penggembira. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah mengamanatkan dalam prinsip dasarnya yaitu salah satu tiang pengakuan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan publik, hal tersebut disahkan dalam Sidang Umum PBB tahun 1979 dan berlaku pada tahun 1981.

Dalam dunia politik, realitanya peran perempuan masih mengalami marginalisasi dan kurang terwakili, walaupun hal tersebut telah ditandatangani dan diratifikasi leh 165 negara. Platform Aksi Beijing pada tahun 1995 mengidentifikasi antara kesenjangan laki-laki dan perempuan terkait dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan, dan tidak hanya itu saja platform tersebut juga mengidentifikasi kurangnya mekanisme yang memajukan perempuan sebagai dua aspek kunci dalam perjuangan untuk perempuan. Belum adanya kesejajaran antara laki-laki dan perempuan di dunia politik dan belum mencapai kesuksesan yang diharapkan, walaupun hal tersebut telah tercapai kemajuan yang signifikan dalam bidang hukum baik tingkat nasional, didukung oleh aktivitas dan mobilitas yang berjalan bertahun-tahun.[[4]](#footnote-4)

Konstitusi Indonesia, khususnya dalam **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945,** dijelskan bahwa perempuan menjadi salah satu yang dapat menerima kesempatan sama di dalam pemerintahan dan ini menjadi hak dari setiap warga Negara. Diperkuat oleh **Pasal 27 ayat (1)**, dimana warga Negara memiliki kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Maka perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan dan keetaraan untuk dapat terlibat dalam dunia politik serta mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, eksekutif ataupun posisi lainnya. Dengan munculnya berbagai partai politik baru di era reformai saat ini menunjukkan bahwa keinginan bagi partisipasi masyarakat yang lebih luas. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik telah menjelaskan terkait dengan dorongan peningkatan partisipasi perempuan di dunia politik di Indonesia. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, menjelaskan terkait langkah-langkah dalam meningkatkan partisipasi perempuan, dengan formulasi "dengan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%", ini menjadi peluang bagi perempuan untuk memiliki kesejajaran dengan laki-laki baik di peran dan kedudukannya, serta berperan aktif dalam di dunia politik guna memperjuangkan hak-hak perempuan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 terkait dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait dengan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan terkait dengan Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum terbaru, dan mengamanatkan dalam kepengurusan partai politik untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota setidaknya 30% keterwakilan perempuan.

Perempuan dan laki-laki perlu adanya kesejajaran dan kesamaan posisi antara keduanya dengan berkompetisi mendapatkan dukungan masyarakat di lembaga legislatif. Akan tetapi untuk mencapai keterwakilan perempuan tersebut perlu adanya upaya dan keterlibatan secara aktif di bidang politik, seperti apa yang sudah terdapat dalam Undang-Undang melalui partai politik.

Rezim undang-undang pemilu dari tahun 2004 sampai 2024 terkait dengan afirmasi terhadap keterwakilan perempuan mengalami perubahan. Disebutkan bahwa setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan dengan jumlah 30%, hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu. Dan diketahui bahwa calon peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diajukan oleh partai politik sekurang-kurangnya 30%, hal tersebut di tegaskan oleh Pemilu 2009, UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008. Sementara pada Pemilu 2014, UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 juga mengadopsi ketentuan yang sama dengan UU Pemilu nomor 10 Tahun 2008. Bahkan, diterbitkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Waalikota dan Wakil Walikota yang menetapkan kewajiban pencalonan perempuan untuk setiap daerah pemilihan sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945, pada Pemilu 2019 dan 2024 , Pasal 177 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menambahkan frasa yang memperkuat keterwakilan pencalonan perempuan di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan mencantumkan kewajiban sekurang-kurangnya 30%.[[5]](#footnote-5) Namun, dalam praktiknya, melibatkan perempuan dalam politik praktis bukanlah sesuatu yang mudah. Meskipun undang-undang menetapkan kuota 30%, namun seringkali tidak terpenuhi sepenuhnya. Pemenuhan kuota dalam partai politik seringkali hanya berupa formalitas belaka, karena ketidak penuhannya dapat menyebabkan partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU, yang pada akhirnya mengakibatkan partai tersebut tidak bisa ikut serta dalam pemilihan umum. Ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara aspek legalitas dan realitas di lapangan. Dalam kurun waktu 2022-2023 keterwakilan perempuan di Pemalang sudah terpenuhi 30 %, berdasarkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perkembangan yang signifikan terkait keterlibatan perempuan dalam parlemen. Berdasarkan Survei Badan Pusat Statistik yang dirilis pada 3 Maret 2023, tercatat adanya peningkatan keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai contoh, di Jawa Tengah, pada tahun 2021, keterlibatan perempuan dalam parlemen hanya mencapai 18,33 persen. Namun, pada tahun 2022, angka ini mengalami kenaikan menjadi 20 persen. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran dan dorongan yang lebih kuat dalam peningkatan representasi proses pengambilan keputusan oleh perempuan.

Khusus di Kabupaten Pemalang, keterlibatan perempuan dalam parlemen tercatat lebih tinggi. Pada periode 2021 hingga 2022, angka keterlibatan perempuan di parlemen di kabupaten ini mencapai 32 persen, menunjukkan bahwa wilayah tersebut telah menunjukkan kemajuan yang lebih signifikan dalam hal kesetaraan gender di bidang politik. Data ini mencerminkan upaya yang berkelanjutan dalam mendorong partisipasi perempuan di sektor politik dan pemerintahan, serta perlunya terus mendukung kebijakan dan inisiatif yang memperkuat peran perempuan di arena publik. Secara keseluruhan, tren peningkatan keterlibatan perempuan dalam parlemen ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan representasi yang lebih inklusif dan seimbang, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Ini juga menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan perempuan di bidang politik telah menunjukkan hasil yang positif, meskipun tantangan untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih luas masih perlu terus dihadapi.

1. **Rumusan Masalah**

Diketahui permasalahan yang penulis teliti berdasarkan latar belakang diatas adalah:

1. Bagaimana Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Pemalang?
2. Apa Kendala Yang Menyebabkan Tingkan Partisipasi Politik Perempuan Di Kabupaten Pemalang 2024 Rendah?
3. **Tujuan Penelitian**

Terdapat beberapa tujuan penelitian yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah diatas, sebagai berikut:

* 1. Untuk mengetahui dan memahami hak Politik Perempuan di Kabupaten Pemalang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
  2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala Hak Politik Perempuan Di Kabupaten tidak begitu Efektif.

1. **Kegunaan Penelitian**

Terdapat dua manfaat didalam penelitian ini, sebagai berikut:

* 1. Secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan saran terkait dengan kesamaan gender dalam perlindungan hak politik perempuan dalam pemilu, khususnya pada Hukum Tata Negara;
  2. Secara praktis, penelitian ini memberi saran serta pemikiran bagi masyarakat kaum perempuan mengenai hak-haknya dalam bidang politik yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

1. **Tinjauan Pustaka**
2. Andie Hevriansyah, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, AWASIA, Vol.1 No. 1 tahun 2021**, Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif. Hasil penelitian sebagai berikut** di dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 menjelaskan terkait dengan hak perempuan dalam keterwakilannya di pemlu legislative Indonesia. Yuridis normatif menjadi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitan pendekatan analisis kualitatif serta sistem presidensial dalam perbandingan penerapan di berbagai Negara. Hak politik keterwakilan perempuan telah tertuang di dalan UU Nomor 7 Tahun 2017 didalamnya membahas tentang Pemilihan Umum. Prinsip inklusi terpenuhi dengan adanya hak politik keterwakilan perempuan dalam sistem Pemilu proporsional representative pada pemilihan anggota legislatif, dan seluruh partai diberi kesempatan oleh proporsional representasi untuk memaksimalkan suara yang didapatkan. Dimana kandidat baik perempuan atau lak-laki diberikan kesempatan yang sama menurut sistem proposal representatif, sanksi tetap diberlakukan dengan syarat minimal 30% bagi yang tidak memenuhi syarat. Dapat disimpulkan juga yaitu Pertama, keterlibatan perwakilan perempuan dalam pemilu legislatif dalam sistem presidensial. Pemilihan calon anggota legislative dengan pemilu presiden dipisahkan oleh adanya pemilu pada sistem pemerintah presidensial. Hak politik keterwakilan perempuan dalam pemilu telah diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2003. UU Nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur terkait keterwakilan perempuan dalam parlemen. Metode zipper menjadi amanat dalam undang-undang pemilu, dimana bakal calon. Penelitian yang menggunakan representative pada 20 negara dan metode distrik dengan menyimpulkan equality of votes yang dikemukakan oleh Orit Kedar, Liran Harsgor dan Raz ASheinerman. Dan mengungkapkan bahwa perempuan dan laki-laki dalam pemilu dilakukan secara bergantian atau selang seling dengan metode yang digunakan yaitu metode proporsional. Dengan demikian makakandidat berkesempatan untuk terpilih. Kedua, dengan keterwakilan perempuan di dalam pemilu proporsional representatif, melalui representasi proporsional dengan “*equality of votes*”, hak yang sama akan diterima oleh perempuan sepertia apa yang laki-laki dapatkan. Dimana kekuasaan diantara partai-partai akan dibagi dalam sistem proporsional representatif, yang menunjukkan kepentingan partai di lembaga legislatif, sehingga perempuan berkesempatan untuk terlibat dalam politik pemilu legislatif yang efektif. Dimana kandidat pria atau wanita diberi kesempatan yang sama kepada partai yang tidak memenuhi syarat sebesar 30% terhadap keterwakilan perempuan sebagai peserta pemilu[[6]](#footnote-6).
3. Marsyifa Novia Fauziah, Mochamad Faizal Rizki dan Rachmat Ramdani, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49, No. 1, Mei 2023: 12 - 22 p-ISSN: 0216-4019 e-ISSN: 2614-025X, **Tantangan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Formal.** Proses perjuangan perempuan dalam mencapai kesetaran di berbagai aspek pembangunan adalah proses tiada henti yang hingga kini terus bergulir, salah satunya pada bidang politik. Tantangan keterwakilan perempuan dalam politik formal membahas tentang peran perempuan di dunia politik dapat memperlihatkan faktor-faktor yang dijadikan alasan mengapa perempuan dapat menjadi pemimpin suatu daerah baik di ranah eksekutif maupun legislatif atau sebagai bupati/walikota/gubernur beserta wakilnya. Faktor-faktor tersebut adalah biaya politik, partai pengusung dan faktor relasi keluarga. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam pemenitian ini dengan tinjauan pustaka atau *library research* sebagai pengumpulan data penelitian. Dan hasil penelitian ini mengatakan bahwa biaya politik di Indonesia tergantung pada wilayah, jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya alam di setiap daerah. Partai pengusung sebagai media pemungutan suara dan hubungan kekeluargaan sebagai cara berkomunikasi dan membentuk personal branding secara cepat.[[7]](#footnote-7)
4. Loura Hardjaloka, Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi, Dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, “Kesempatan setiap orang dalam memperjuangkan haknya dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara secara kolektif”, Pasal 28D ayat (3) yang bunyinya, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. UUD 1945, di UU Pemilu, Pasal 7 dan Pasal 8 CEDAW telah menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan dan kesempatan yang sama didunia politik atau yang lainnya. Akan tetapi dengan adanya stereotip negatif terhadap kemampuan perempuan menjadi hal yang dapat menghambat keterwakilan perempuan di dunia politik.[[8]](#footnote-8)

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada fokus tulisan ini membahas tingkat partisipasi perempuan di Pemalang pada pemilihan 2024. Topik ini memiliki urgensitas tinggi untuk dibahas karena keterwakilan perempuan dalam parlemen sangat penting untuk menstimulasi kebijakan dan produk undang – undang yang lebih memperhatikan kaum perempuan. Oleh karena itu, Keterlibatan perempuan di dunia politik sangat penting dengan keberanian dan kehati-hatian, serta menyampaikan isu-isu pemerintahan dengan pemahaman penuh akan konteksnya, terutama karena banyak perempuan tidak mengalami kebebasan sosial seperti yang dinyatakan dalam pemikiran liberal. Perempuan harus memproses isu-isu tersebut secara kritis, bukan hanya membicarakan demokrasi tanpa mempertimbangkan kritik, seolah-olah itu berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial, atau budaya.

1. **Metode penelitian**
   1. **Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai jenis penelaahan penelitian. Disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan dokumen resmi yang bersifat publik.**[[9]](#footnote-9)4** Hukum doktrinal atau hukum yang tertuang dalam Undang-undangdan dikonsepsikan pada peraturan yang berlaku, hal tersebut dapat menggambarkan penelitian ini.[[10]](#footnote-10)5

* 1. **Metode Pendekatan**

Yuridis normatis merupakan metode penelitian untuk meneliti pendekatan norma hukum/ perundang-undangan yang menjadi permasalahan.

* 1. **Spesifikasi Penelitian**

Penelitian deskriptif menjadi spesifikasi penelitian yang menggambarkan permasalahan-permasalahan Keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya dalam konteks Pemilu Legislatif 2024 di Pemalang.. Dengan mandat hukum yang menetapkan keterwakilan minimal 30% perempuan di parlemen, upaya untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik telah diamanatkan, sehingga diharapkan dari permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya.

* 1. **Sumber Data**

Penelitian ini meñggunakan dokumentasi dan kepustakaan sebagai data sekunder yang melibatkan orang lain atau peneliti sebelumnya. Keutamaan data sekunder :

Memudahkan peneliti memperoleh data;

Data yang diperoleh lebih objektif;

Hasil analisis data lebih terukur, karena terdapat perbandingan dengan hasil penelitian oleh peneliti terdahulu.[[11]](#footnote-11)6

Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam penyelesaian masalah, sebagai berikut:

1. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa badan hukum primer termasuk dalam badan hukum otoritas yang memiliki sifat autoritatif. Bahan hukum primer memiliki bagian berupa perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dan putusan-putusan hakim.[[12]](#footnote-12)7
2. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
5. Bahan hukum sekunder. Buku tes, kampus hukum, jurnal dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan bukan termasuk dokumen-dokumen menjadi sumber dari bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.[[13]](#footnote-13)8
6. Bahan hukum tertier.

Khudzaifah Dimyati & Kelik Wardiono mengemukakan bahwa informasi badan hukum baik itu badan hukum sekunder atau kamus bahasa maupun bibliografi merupakan pengertian dari badan hukum tertier.[[14]](#footnote-14)9 Kamus Bahasa digunakan sebagai bahan hukum tertier.

* 1. **Metode Pengumpulan Data**

*Library research* sebagai metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Dengan mempelajari, mengidentifikasi serta mencatat literature, memahami dan melibatkan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang terjadi ini mrnjadi bagian dari metode pengumpulan data yang digunakan.

* 1. **Metode Analisis Data**

Analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menafsirkan atau mendiskusikan teori atau doktrin serta asas peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan.

1. **Sistimatika Penulisan**

Penelitian ini disususn dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan** yang berisikan : Latar belakang masalah; Rumusan masalah; Tujuan penelitian; Kegunaan penelitian; Metode penelitian; Sistimatika penelitian.

**Bab II Tinjauan Konseptual** yaitu mengenai : Tinjauan Umum tentang Pemilu, Tinjauan Umum tentang Gender, Tinjauan Umum tentang Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu.

**Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan,** meliputi : Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Pemalang, dan Kendala Yang Menyebabkan Tingkan Partisipasi Politik Perempuan Di Kabupaten Pemalang 2024 Rendah.

**Bab IV Penutup**, yaitu berisi Kesimpulan atas hasil pembahasan, dan Saran.

**BAB II**

**LANDASAN KONSEPTUAL**

* + 1. **Tinjauan Umum tentang Pemilu**
  1. **Pengertian Pemilu**

Negara demokrasi dapat dicirikan dengan asanya pemilu yang berlangung. Pemilu ini menjadi penentu pemimpin atau wakil-wakil pemerintahan dengan ketentuan bahwa oleh rakyat melalui kegiatan pemilihan umum/pemilu. Aspirasi atau partisipasi masyarakat dapat tercermin dengan adanya terselenggaranya pemilihan umum dengan suasana keterbukaan, kebebasan berpendapat dan berserikat.[[15]](#footnote-15)

Pemilu merupakan kegiatan yang dapat memberikan kesempatan masyarakat dalam menentukan pejabat-pejabat pemimpin Negara yang mereka yakini dapat memajukan atau memberikan kontribusi bagi daerah atau Negara, hal tersebut menurut Ramlan Surbakti.[[16]](#footnote-16)

Dan sebaliknya, semakin buruknya penyelenggaraan pemilu di sebabkan oleh rendahnya tingkat kebebasan. Meningkatnya kadar demokrasi yang terdapat dalam penyelenggaraan pemilu menjadi sebab dari semakin banyaknya rakyat yang ikut dalam pemilu.[[17]](#footnote-17)

Kedaulatan rakyat yang bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didasari oleh pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pengertian dari pemilu. Dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 (pasar 1 ayat (2) Undang-Undang No 8 tahun 2012) menunjukkan pemilu anggota DPR, DOD, dan DPRD dengan pemilhan anggota DPR, DPD, DPRP, dan DPRD kabupaten/kota dana NKRI, dimana hak pemilihan tersebut berada di tangan rakyat dan dilakukan pemilihan secara langsung. Metode yang digunakan bersifat langsung atau perwakilan. Di lain sisi, sara kebebasan pers, kebebasan berpendapat baik secara lisan atau tulisan, kebebasan berkumpul atau berserikat dan hak untuk berhenti menurut ketentuan hukum perusahaan ini dapat dirasakan oleh rakyat. Hal tersebut juga tidak terlepas dari peraturan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan hak tidak melanggar asasi orang lain, hak tidak untuk dihina dan untuk merendahkan orang lain yang telah tertuang dalan Pasal 28 G ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[[18]](#footnote-18)

Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen dengan melalui DPR, DPD, dan DPRD, akan tetapi kepentingan rakyat dapat disalurkan melalui wakil yang berada di parlemen dapat mewujudkan kedaulatan rakyat secara tidak langsung. Dengan harapan penentuan proses kebijakan kenegaraan baik itu dalam bentuk undang-undang atau pengawasan dapat mendengarkan kepentingan rakyatnya. Pemilihan umum akan diselenggarakan setiap lima tahun sekali, walaupun pemilu menjadi salah satu penyalur aspirsi dan kedaulatan rakyat secara langsung.

Pemilu dilaksanakan untuk memilih calon pemimpin Negara atau partai politik dalam memenuhi kedudukannya sebagai lembaga perwakilan rakyat atau lembaga eksekutif. Terbagi menjadi tiga masa dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagai berikut:[[19]](#footnote-19)

1. Pemilu masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin/Orde Lama
2. Pemilu masa Orde Baru.
3. Pemilu masa Reformasi.

Dimana pemilihan umum di Indonesia dilakukan dalam waktu satu hari dengan melibatka 150 juta pemilih lebih, dimana harus dilakukan pemilihan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan mungkin ini merupakan pemilu terbesar di dunia.

Terdiri dari berbagai aspek dalam pemilu, yaitu tahapan, maajemen, biaya, etika, penegakan hukum dan sebagainya. Dengan merubah suara rakyat menjadi kursi diparlemen, maka pemilu disebut bersifat teknis. Pelaksanaan sistem pemilu sangat mempengaruhi keevektifan pemilu, dimana KPU menentukan kinerja partai politik sebagai peserta pemilu, hak rakyat dalam proses pemilu, dan kredibilitas pihak penyelenggara pemilu.[[20]](#footnote-20)Dan dijelaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah menjelaskan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Dalam Pasal 22E ayat 5 dijelaskan juga bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Sifat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mandiri atau independen didasarkan pada pemahaman bahwa pihak penyelenggara pemilu harusnya bersifat netral dan tidak memihak serta tidak boleh berada di bawah kendali partai politik maupun pejabat negara. Peserta pemilu sendiri terdiri dari partai politik beserta para anggotanya yang menjadi calon dalam perhelatan pemilu, calon atau anggota DPR, calon atau anggota DPD, calon atau anggota DPRD, calon atau Presiden dan Wakil Presiden, calon atau Gubernur dan Wakil Gubernur, calon atau Bupati dan Wakil Bupati, calon atau Walikota dan Wakil Walikota yang semuanya terdaftar oleh KPU sebagai penyelenggara sehingga KPU harus terbebas dari kemungkinan terpengaruh oleh peserta pemilu diatas. Adapun tahap-tahap yang harus dilewati oleh para peserta pemilu untuk mengikuti pemilu tersebut yaitu pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, penyusunan dan perhitungan suara, pemantapan hasil pemilihan, peresmian atau pelantikan para calon terpilih. Dengan terlindungi dan terjaminnya hak dasar ataupun hak asasi warga negara dapat menciptakan pemilu yang dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

* 1. **Sistem Pemilihan Umum**

Kegiatan yang dilakukan setiap lima tahun sekali dengan melibatkan warga Negara untuk memilih para pemimpin dan wakil Negara menurut Arfan Gafar disebut dengan pemilu.[[21]](#footnote-21) Menyalurkan jumlah surat suara ke kursi suara baik dalam pemilihan Lembaga Perwakilan Rakyat atau DPR dan DPRD. Berbeda halnya dengan pemilihan presiden, gubernur, dan bupati yang merepresentasu tunggal dalam sistem pemilihan, dan suara yang diperoleh menjadi penentu siapa yang menang dan kalah. Dan pemilihan umum berkaitan dengan faktor internal berupa partisipasi aktif dan kontrol masyarakat, kelompok kepentingan, LSM, pers bebas dan mandiri, solidaritas masyarakat madani, dan atmosfer makro kepolitikan. Faktor internal yaitu kualitas anggota dan kapasitas sistem dan mekanismen kelembagaan legislative. Faktor perantara atau penghantar menjadi faktor yang memberikan pengaruh seseorang menjadi bagian dari legislatif melalui prosedur dan mekanismenya.

Terdapat enam prinsip petunuk dalam memilih pemilu sebagai berikut menurut Joko J. Prihatmoko:[[22]](#footnote-22)

1. Sistem pemilu memberikan pengaruh terhadap persaingan kandidat dan watak seseorang.
2. Sistem pemilu dapat dengan mudah dipermainkan guna memperlancar perilaku politik tertentu terutama pada partai-partai besar.
3. Jumlah dan ukuran relatif dalam partai politik di parlemen dapat dipengaruhi oleh Sistem pemilu.
4. Kedisiplinan dan keterpaduan internal dapat ditentukan dengan adanya sistem pemilu. Terdorongnya *faksionalisme* dan menekannya perkembangan *(disobedience)* yang memaksa partai-partai untuk bersatu suara.
5. Sistem pemilu dapat menentukan pembentukan koalisi dengan berbagai kendala dari partai mayoritas.
6. Berbagai alinasi dari berbagai partai dapat terbentuk dengan adanya dorongan dari sistem pemilu. Dan diharapkan dapat menghindari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan etnik, kesukuan atau kekerabatan.

Dua hal pokok yang menjadi pengacu dan berkaitan dengan sistem pemilhan umum yang erat hubungannya dengan politik di indonesia menurut Muh Nur Sadik sebagai berikut:[[23]](#footnote-23)

1. Bagaimana mengimplementasikan demokrasi,
2. Menemukan sistem yang unggul dan handal dalam melaksanakanpemilu di Indonesia yang cocok dengan masyarakat majemuk atau pluralitas di Indonesia.

TA. Legowo dan Sebastian Salang juga mnyatakan dalam pendapatnya yaitu pemilu yang sesuai dengan pemilu 2009 terkait perubahan sistem yaitu:[[24]](#footnote-24)

1. Ambang batas (threshold),
2. Daerah Pemilihan (dapil)
3. Jumlah kursi DPR dan DPRD Kabupaten/Kota,
4. Penghitungan sisa suara kursi,
5. Teknis pemberian suara,
6. Dan calon perempuan.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penenarapan sistem pemilu yang dilakukan dimana saja menurut Sukarna, sebagai berikut:[[25]](#footnote-25)

1. *Social culture (education of the people),*
2. *The position of political party,*
3. *Press and public opinion,*
4. *The law of general election,*
5. *The role of armed forces in politics,*
6. *The man in position,*
7. *Order,*
8. *Security,*
9. *Social economy.*

Pemilihan umum disuatu Negara dilakukan dengan tujuan untuk menentukan pemimpin nasional secara konstitusional. Dan sistem pemilu dapat diartikan dengan berbagai arti yang berbeda sesuai dengan pandangan masing-masing orang. Pemilu menjadi sistem pemilihan yang paling utama dalam melakukan pemeilihan pemimpin yang dapat memberikan kontribusi terbaiknya bagi pemerintahan atau Negara.

Sistem yang berimbang dengan kombinasi berbagai sistem yang pernah diselenggarakan di pemilu Indonesia. Sistem proporsional terbuka menjadi salah satu contoh pemilu pada tahun 2014 dalam melakukan pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sistem distrik berwakil banyak juga digunakan dalam pemilihan DPD. Terdiri dari beberapa aspek positif pasa sistem perwakilan berimbang sebagai berikut:[[26]](#footnote-26)

1. Pemilu dianggap demokratis dan mewakili seluruh yang ada di masyarakat jika diselenggarakan melalui parlemen dan perolehan suara rakyat dari masing-masing daerah.
2. Dengan heterogennya maka masyarakat memiliki kedudukan yang sama untuk menduduki suatu posisi, dan hal tersebut dianggap lebih adil untuk golongan kecil sekalipun.
3. Kepentingan nasional lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan daerah melalui sistem pemilihan wakil rakyat yang digunakan.

Terdapat beberapa kelemahan dalam proses pemilu disambing keunggulan yang ada, sebagai berikut:[[27]](#footnote-27)

1. Pembuatan partai baru dialami di kalangan anggota partai untuk memisahkan diri. Dengan demikian maka dapat menimbulkan keenderungan mempertajam perbedaan yang ada dan saling bersaing dibandingkan untuk saling berbaur.
2. Partai lebih dominan dibandingkan dengan kepribadian seseorang yang memperkuat kedudukan pemimpin partai, hal tersebut menjadikan wakil yang terpilih akan lebih terikat ke partainya dibandingkan ke daerah yang memilihnya. Disebabkan dengan tidak dikenalnya wakil terpilih tersebut didaerahnya dan ini menjadi kelemahan pada Negara Indonesia.
3. Sulitnya partai dalam memperoleh suara mayoritas (50% + 1), menyebabkan partai dengan suara terbanyak mengusahakan suatu koalisi guna memperoleh suara mayoritas di parlemen. Hal tersebut menjadi penyebab pemerintah tidak stabil karena koalisi tersebut tidak tetap. Pada konteks terbuka pemilu menjamin adanya partsipasi seluas-luasnya dari rakyat guna melaksanakan hak politik yang dimilikinya. Berbeda halnya dengan konteks terbatas dalam pemilu, dimana tidak setiap orang dapat menjadi wakil rakyat walaupun hal tersebut sebenarnya dapat dilakukan oleh siapapun. Maka terjalin hubungan yang luas dalam mengindentifikasi aspirasi rakyat menjadi sebuah program politik yang akan diusulkan ke DPR dan wakilnya dengan pencarian cara menjadikan aspirasi tersebut menjadi keputusan politik, hubungan luas tersebut terjadi antara rakyat, partai politik, dan wakil rakyat.

Terlaksananya pemilu secara demokratis dan professional menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pemilihan yang berintegritas dan tidak memihak, maka hal tersebut dapat memperlihatkan integritas dalam pemilu.[[28]](#footnote-28) Jalannya pemerintahan dari masa kemasa menjadi menjadi mekanisme yang dijalankan dalam pemilu yang bebas dan bersih. Indonesia menjadi Negara yang berhasil dalam penyelenggaraan pemilu melalui sistem multi partai yaitu Indonesia dan hal tersebut telah diakui oleh dunia. Akan tetapi angka golput dalam pemilihan umum masih tinggi sehingga tercorengnya kualitas pemilu.

1. **Tinjauan Umum Tentang Gender**
2. **Gender dan Politik**

Gender adalah salah satu kata yang menggambarkan laki-laki dan perempuan, baik secara sosial ataupun kultural. Lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan menjadi gambaran dari perempuan. Sedangkan sifat kuat, rasional, perkasa dan jantang lebih melekat pada laki-laki.[[29]](#footnote-29) Perempuan dipandang sebelah mata dalam berbagai hal, baik pada aspek politik, ekonomi, sosial, ataupun hak-hak reproduksi, hal tersebut menurut Suparjan dan Hempri Suyanto di dalam idiologi *developmentalisme* “Perbedaan antara laki-laki dan perempuan menjadi salah satu pembeda dalam berbagai hal. Dimana perempuan lebih dikenal memiliki sifat yang feminism, dan laki-laki memiliki sifat yang maskulin. Dan sistem patriarki membenarkan trkait dengan perbedaan biologis tersebut yang sangat melekat pada masyarakat”. Terbangunnya ideologi gender didasarkan pada budaya dengn mengatur pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Aspek kehidupan dan struktur masyarakat diwarnai dengan kentalnya budaya dan ideology patriarki.[[30]](#footnote-30)

1. **Perempuan dan Politik**

Kegiatan warga Negara menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson menjadi pengaruh terjadinya pembuatan keputusan. Individual atau kolektif, mantap atau sporadic, terorganisir atau spontan, legal atau iillegal dan efektif atau tidak efektif merupakan sifat dari patrisipasi.Konvensi Hak Politik Perempuan, yang pada 1952 diterima PBB dan telah diratifikasi oleh DPR melalui Undang-Undang nomor 68 tahun 1958, pada pasal 1 menetapkan bahwa; “ Hak sama perlu diberlakukan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan pemilihan suara tanpa diskriminasi *(Women shall be entitled to vote in all elections on equal terms with men without any discrimination*)”. Dimana bidang politik sangat membutuhkan partisipasi perempuan, hal tersebut disebabkan oleh masyarakat yang mengharapkan kedudukan sama antara laki-laki dan perempua[[31]](#footnote-31).

1. **Tinjauan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu.**

Berdasarkan sejarah, tersebar secara luas terkait dengan pendidikan dan pekerjaan di dunia sosial politik. Berkurangnya efek diskriminasi dapat dilakukan dengan motivasi untuk affirmasi baik itu universitas, rumah sakit dan kantor polisi.[[32]](#footnote-32) Dalam mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan maka dapat dilakukan dengan tindakan khusus konvensi perempuan. Pasal 46a. Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan system pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 juga menjelaskan keterwakilan perempuan di dunia politik tentang Keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif telah terjamin oleh adanya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif), dengan ketentuan minimal 30% perempuan sebagai calon anggota legislatif. Dan terdapat peraturan perundang-undangan yang memperkuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 terkait calon anggota legislatif.[[33]](#footnote-33)

Penerapan kuota yang memberikan kesempatan perempuan untuk berpartisipasi di lembaga legislatif, hal tersebut diimplementasikan menurut Ratnawati. Dengan adanya kuota yang diberikan kepada perempuan maka hal tersebut lebih terwakilkan. Dengan keterlibatan perempuan diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang baik, baik dibidang politik, ekonomi, sosial ataupun budaya. Dengan keputusan tersebut, maka ruang gerak perempuan dalam sektr politik lebih berkembang.[[34]](#footnote-34) Berbagai Negara telah menganggap hal tersebut dapat meningkatkan peran politik perempuan di parlemen, seperti halnya di Afrika Selatan hampir 27% di parlemen di duduki oleh perempuan hal tersebut terjadi setelah Undang-Undang penerapan kuota mengalami perubahan. Sedangkan di India peran perempuan telah mendominasi dan memahami negaranya terkait dengan kuota calon legislative perepuan.

Perempuan diberikan kesempatan dalam menduduki dan melaksanakan perannya dibidang eksekutif, legislative dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait dengan Hak Asasi Manusia. Keterwakilan perempuan mengacu pada partisipasi dan kehadiran perempuan dalam berbagai bidang atau pengambilan keputusan, baik dalam politik, pemerintahan, ekonomi, maupun sektor lainnya. Keterwakilan ini sering dikaitkan dengan upaya untuk memastikan bahwa perempuan memiliki peran yang setara dan berkontribusi dalam pembuatan kebijakan atau keputusan yang memengaruhi masyarakat luas. Dalam konteks politik, misalnya, keterwakilan perempuan merujuk pada proporsi perempuan yang terlibat sebagai anggota parlemen, kepala daerah, atau posisi kepemimpinan lainnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan gender dan memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan perempuan terakomodasi dengan baik dalam kebijakan publik. Beberapa negara bahkan menetapkan kuota khusus untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan akses yang adil dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan. Para ahli memberikan pandangan yang beragam mengenai konsep keterwakilan perempuan, yang umumnya didasarkan pada prinsip kesetaraan gender dan demokrasi. Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Hellen dalam Rasyidin.[[35]](#footnote-35) Ia memisahkan fitur manusia berdasarkan pada definisi sosial budaya dan manusia yang bertakrif pada karakteristik fisik biologis. Keterwakilan Perempuan menurut Anne Phillips yaitu Pondasi dasar bagi politik keterwakilan adalah pengakuan kesetaraan politik seluruh masyarakat dan adanya kontrol publik yang kuat terhadap keberlangsungan politik, sehingga perlu keterwakilan secara langsung dari perempuan (kalangan minoritas) dalam lembaga-lembaga negara. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terlihat rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen yaitu faktor structural yang meliputi sistem pemilu didominasi oleh laki-laki. Selanjutnya perempuan dianggap tidak mampu atau tidak pantas memberikan pemikirannya di dunia politik, pembagian kerja yang dianggap beban, hal tersebut menunjang stereotype negatif dan menyita waktu ataupun pikiran.[[36]](#footnote-36)

Dengan adanya representasi perempuan maka dapat memperjuangkan isu-isu penting bagi kesejahteraan perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan demokratis.[[37]](#footnote-37) Maka dengan adanya partai politik dapat menunjukkan atau memberikan tenpat pada partisipasi perempuan pada proses pemilihan umum.[[38]](#footnote-38)

Keterwakilan perempuan dalam politik mengambil berbagai bentuk di dalam struktur pemerintahan dan lembaga pengambilan keputusan. Bentuk keterwakilan perempuan dalam politik antara lain:

1. Keterwakilan di Lembaga Legislatif. Anggota Parlemen: Perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), atau DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Mereka berperan dalam menyusun undang-undang, kebijakan, dan anggaran negara atau daerah. Kuota Perempuan: Kebijakan kuota, seperti yang diterapkan di Indonesia, dengan memperlibatkan 30% calon yang berjenis perempuan sebagai calon legislatif guna memastikan keterwakilan perempuan di parlemen.
2. Keterwakilan di Lembaga Eksekutif Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan: Perempuan yang menjabat sebagai presiden, perdana menteri, atau wakil presiden. Kepala Daerah: Perempuan yang memegang posisi sebagai gubernur, bupati, atau walikota di tingkat lokal. Menteri atau Pimpinan Lembaga Negara: Perempuan yang diangkat sebagai menteri dalam kabinet, atau sebagai pemimpin lembaga negara, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
3. Keterwakilan di Partai Politik Pengurus Partai Politik: Perempuan yang menjabat sebagai pengurus, ketua, sekretaris jenderal, atau bendahara di partai politik. Posisi ini memungkinkan mereka untuk mempengaruhi strategi partai dan kebijakan internal partai. Calon Legislatif dan Eksekutif: Perempuan yang dicalonkan oleh partai politik untuk berbagai jabatan politik, baik di legislatif maupun eksekutif, sebagai bentuk representasi politik.
4. Keterwakilan dalam Badan Independen atau Lembaga Pengawas Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu): Perempuan yang menjadi anggota atau pimpinan di lembaga yang bertugas mengawasi proses pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah. Komisi-komisi Negara: Perempuan yang terlibat dalam komisi-komisi independen, seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan komisi lainnya yang berperan dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap hak-hak perempuan dan masyarakat.
5. Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri Perwakilan Diplomatik: Perempuan yang ditugaskan sebagai duta besar atau diplomat dalam hubungan internasional, mewakili kepentingan politik negara di tingkat global. Delegasi Internasional: Perempuan yang terlibat dalam konferensi internasional atau lembaga-lembaga global, seperti Perserikatan BangsaBangsa (PBB), yang berkontribusi pada perumusan kebijakan internasional.
6. Keterlibatan dalam Organisasi Masyarakat Sipil Aktivis dan Pemimpin Gerakan Sosial: Perempuan yang memimpin gerakan sosial dan fokus pada pada isu-isu politik oleh oraganisasi masyarakat sipil, seperti hak asasi perempuan, kesetaraan gender, lingkungan, atau hak-hak minoritas.

Keterwakilan ini memungkinkan perempuan untuk berkontribusi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan di berbagai level, mendorong inklusivitas, dan memastikan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lainnya yang lebih responsif.

1. 1 Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945* Makalah Disampaikan Pada: SEMINAR PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL VIII Diselenggarakan Oleh BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI Denpasar, 14-18 Juli 2003 [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Abdul Azis Wahab, *Pendidikan Pancasila I*, Universitas Terbuka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2002, hlm. 323. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Anas Urbaningrum, *Jangan Mati Reformasi,* Penerbit : Yayasan Cita Mandiri Indonesia, Jakarta, 1999, hlm, 74. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ballington, J., & Karam, A. M. (2002). *Perempuan di Parlemen: Bukan sekadar jumlah* (Ed. bahasa Indonesia). International IDEA [↑](#footnote-ref-4)
5. Kiftiyah, A. (2019). *Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia*. 14(1). [↑](#footnote-ref-5)
6. Andie Hevriansyah, **Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif.** Jurnal Pemilu dan Demokrasi, AWASIA, Vol.1 No. 1 tahun 2021. [↑](#footnote-ref-6)
7. Marsyifa Novia Fauziah, Mochamad Faizal Rizki dan Rachmat Ramdani, **Tantangan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Formal.** Universitas Singaperbangsa Karawang, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49, No. 1, Mei 2023: 12 - 22 p-ISSN: 0216-4019 e-ISSN: 2614-025X,* [↑](#footnote-ref-7)
8. Loura Hardjaloka, Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi, *Jurnal Konstitusi https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/ download /928/136/264* [↑](#footnote-ref-8)
9. 4 Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm, 13-14 [↑](#footnote-ref-9)
10. 5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm, 13 [↑](#footnote-ref-10)
11. 6 Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hlm, 78 [↑](#footnote-ref-11)
12. 7 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta, 2010, hlm, 141 [↑](#footnote-ref-12)
13. 8 *Ibid.,* hlm, 141 [↑](#footnote-ref-13)
14. 9 Khudzaifah Dimyati & Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum,* Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2004, hlm, 13 [↑](#footnote-ref-14)
15. Miriam Budirjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008, hlm. 461. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik:PT.Grasindo, Jakarta . 1992 hlm. 15 [↑](#footnote-ref-16)
17. Syahrial Syarbaini,dkk. Sosiologi dan Politik, Ghalia Indonesia, Jakarta 2002, hlm.80 [↑](#footnote-ref-17)
18. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [↑](#footnote-ref-18)
19. Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta, hlm. 176. [↑](#footnote-ref-19)
20. Cakra Arbas, 2012, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh,* Sofmedia, Jakarta, hlm. 31. [↑](#footnote-ref-20)
21. Afan, Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi,* Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2005. hlm 10 [↑](#footnote-ref-21)
22. Joko J,Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*,Cetakan I, Pustaka Pelajar,Yogyakarta,2008, hlm 34 [↑](#footnote-ref-22)
23. Muh Nur Sadik, *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, Vol 13 Nomor 2, Fakultas Hukum UMM, hlm 249 [↑](#footnote-ref-23)
24. TA Legowo dan Sebastian Salang, *Panduan Menjadi Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Mengahadapi Pemilu*, cetakan I, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm 18 [↑](#footnote-ref-24)
25. Sukarna, *Sistem Politik*, Alumni, Bandung, 1981, hlm 88 [↑](#footnote-ref-25)
26. Miriam Budiardjo, 2000, *Sistem Pemilu Yang Bagaimana? Dalam Sistem- Sistem Pemilihan Umum, Suatu Himpunan Pemikiran*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 26-27. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid.,* Miriam Budiardjo, hlm. 27-28. [↑](#footnote-ref-27)
28. Tota Pasaribu, R. Widya S.S, dan Muradi, Pemilu Berintegritas (Studi Pada Pendaftaran Pemilih Terhadap Pengguna Surat Keterangan Domisili Dalam Pilkada Samosir Tahun 2015), *Journal of Governance, Vol. 3, No. 2*, Desember 2018, hlm. 169. [↑](#footnote-ref-28)
29. Mansour Faqih, *Menggeser Konsepsi Gender* (Pustaka Pelajar, 1996), 51. [↑](#footnote-ref-29)
30. Argyo Demartoto, *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2005), 18. [↑](#footnote-ref-30)
31. Juree Vichit-vadakan, Under-Rebresentation of Wpmen in The Politics, 2004, *Jurnal Kebijakan Partai Politik dalam Merespon Pemberlakuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Anggota Legislatif pada Pemilu 2009*, 16. [↑](#footnote-ref-31)
32. *http://id.wikipedia.org, diunduh pada tanggal 25 Desember 2024* [↑](#footnote-ref-32)
33. *Theglobejournal,* Sosial Indonesia Membutuhkan Pemimpin (Surabaya: http://theglobejournal.com), 2 juni 2014 [↑](#footnote-ref-33)
34. Ratnawati, Poteret Kuota Perempuan di Parlemen *(Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2004*), 305. [↑](#footnote-ref-34)
35. Dr. H. Rasyidin, S.Sos.,MA, Politik Gender Aceh: *Studi tentang Pemberdayaan Politik Gender di Provinsi Aceh Pasca MoU Helsinki*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2014, hlm. 24. [↑](#footnote-ref-35)
36. Audra Jovani, *Pentingnya Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia di Era Digital*, Artikel Ilmiah Universitas Kristen Indonesia. 2015, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-36)
37. Joni Lovenduski, *penerjemah, Hardono Hadi, Politik Berparas Perempuan,* RajawaliPress, 2008, hlm. 340. [↑](#footnote-ref-37)
38. Isyrofah Amaliyah Achmad, Penguatan Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik, *Jurnal Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1*, September 2018, hlm. 173 [↑](#footnote-ref-38)